

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan pembinaan pengajaran dan pelatihan (Zainuddin, 2008: 1). Proses menunjukkan adanya aktivitas dalam bentuk tindakan aktif dimana terjadi suatu interaksi yang dinamis dan dilakukan secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan bersifat aktif dan terencana agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu pemanusiaan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin dan berakhlak mulia.

Kondisi dunia pendidikan di Indonesia hingga kini masih memprihatinkan. Persoalan pendidikan tidak hanya berkutat pada masalah gedung sekolah yang hampir runtuh, tetapi juga pada persoalan klasik lainnya, yakni kurangnya tenaga guru (Rendikawati, 2008: 56). Saat ini Indonesia masih kekurangan sedikitnya 200.000 tenaga guru. Data tersebut diungkap oleh Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, Ali Muwarni. Kekurangan kebutuhan guru terbesar adalah tenaga guru SD kemudian berturut-turut SMP, SMA, dan SMK. Sementara kebutuhan guru terkecil yaitu guru TK.

Minimnya jumlah guru saat ini hampir terjadi di seluruh Indonesia, terutama di kabupaten-kabupaten terpencil (Cahyono, 2010: 2). Di daerah

terpencil, tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki satu dua guru dan kadang merangkap sebagai kepala sekolah. Akibatnya, guru harus mengajarkan beberapa mata pelajaran dan harus mengajar lebih dari satu kelas. Berdasarkan data Balitbang Depdikbud tahun 1998 terdapat sekitar 12.000 SD yang gurunya harus mengajar lebih dari satu kelas.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah sejak 1975 melalui proyek Inpres dalam tahapan beberapa Repelita secara kuantitatif telah menunjukkan hasil luar biasa (Anonim, 2005: 5). Data Balitbang tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang semula hanya 13 juta pada tahun 1975 telah bertambah menjadi hampir 29 juta pada tahun 2003. Tingkat partisipasi pendidikan dasar yang semula di bawah 50% telah mencapai hampir 100%. Yang belum memperoleh layanan pendidikan dasar sebagian besar terdiri dari individu yang memang memerlukan layanan khusus.

Sedikitnya, 130 bangunan sekolah dasar di Kampung Presiden SBY kondisinya sangat memprihatinkan (Priyana, 2008: 4). Selain kondisi fisik bangunan sudah rapuh, ketika musim hujan tiba atapnya banyak yang bocor. Sehingga sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir anggaran dinas pendidikan di Pacitan mencapai 39 persen dari seluruh anggaran APBD. Namun, kebanyakan di gunakan untuk membayar gaji para guru. Sedangkan sekolah yang sudah dipugar untuk tahun 2008 mencapai 113 sekolah. Dari jumlah tersebut, akhir tahun 2008 ini ke-113 sekolah tersebut sudah selesai pemugarannya.

Berkaitan dengan kenyataan diatas maka pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan komitmennya dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai wujud dari pembangunan pendidikan secara utuh bagi seluruh warga negaranya (Nardi, 2009: 2). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun masyarakat masih saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemenuhan haknya dalam bidang pendidikan, terutama kesempatan mengikuti pendidikan dasar masih tidak merata, hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, wilayah yang terpencil dan sebagainya.

Pendidikan dasar sangat berperan penting untuk meletakkan dasar bagi upaya memberikan pendidikan bagi warga negara oleh karena itu keterlaksanaannya merupakan sesuatu hal yang wajib sifatnya (Saadah, 2010: 2). Layanan pendidikan dasar tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan yang formal saja namun juga individu yang memerlukan layanan khusus, seperti anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan anak-anak dari keluarga miskin. Suatu kondisi yang bertolak belakang bahwa memang sekolah-sekolah yang terletak di daerah perkotaan padat penduduk atau sekolah-sekolah favorit mempunyai jumlah siswa yang relatif stabil.

Sekolah sebagai lembaga pelayanan dibidang pendidikan di harapkan dapat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat dalam meningkatkan

kualitas SDM di Indonesia, karena itulah kualitas pembelajaran di sekolah harus selalu ditingkatkan guna memberi jawaban kongkrit dari kebutuhan masyarakat modern tersebut (Anonim, 2007: 1). Disamping itu bahwa pendidikan yang dipandang masyarakat merupakan investasi jangka panjang, maka diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi kehidupan global, kompetitif dan inovatif.

Sekolah sebagai suatu organisasi, memiliki budaya tersendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasan, kebijakan-kebijakan pendidikan, dan perilaku orang-orang yang berada di dalamnya (Komariah, 2008: 101). Sebagai suatu organisasi, sekolah menunjukkan kekhasan sesuai dengan *core* bisnis yang dijalankan, yaitu pembelajaran. Budaya sekolah semestinya menunjukkan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran, yaitu menumbuhkembangkan peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selama ini kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa pendidikan adalah hak yang harus mereka terima. Kewajiban-kewajiban pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia, yang pertama yaitu *available* (disediakan), maksudnya ada penjaminan pendidikan tanpa biaya dan wajib belajar bagi semua anak. Tentu saja dengan memperhatikan kebebasan orang tua untuk memilih tempat anak bersekolah, yang kedua yaitu *accessible* (dijangkau), memprioritaskan penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari UU hak asasi manusia internasional, kemudian *acceptable* (diterima), bagaimana mutu pendidikan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, dan

yang terakhir adalah *adaptable* (d disesuaikan) yang menekankan pada prinsip-prinsip utama hak-hak anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan menyesuaikan minat utama setiap individu anak.

Alternatif kebijakan lain yaitu tetap mempertahankan sekolah-sekolah kecil dengan pembelajaran kelas rangkap (*PKR*)/*Multigrade Teaching*. Pembelajaran Kelas Rangkap atau *Multigrade Model* merupakan strategi pembelajaran dengan menerapkan perangkapan kelas (dua kelas atau lebih) dan perbedaan tingkat kemampuan yang dilakukan oleh seorang guru dalam waktu yang bersamaan (Ian, 2010: 2). Dengan model ini, jumlah siswa yang tidak memenuhi ambang batas dibiarkan seperti apa adanya, kemudian dilakukan penggabungan dua atau tiga tingkat dalam sekolah yang sama dengan satu guru. Yang digabung justru dua atau tiga tingkat dalam sekolah yang sama dengan satu guru.

Pembelajaran kelas rangkap juga sering disebut *multigrade teaching* (MGT) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pembelajaran kelas rangkap (Ruslan, 2011: 2). Alasan membawa MGT ke muka yaitu pengenalan mengenai MGT yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran walaupun terhambat kendala kekurangan tenaga guru. MGT bukanlah ide yang baru, tetapi saat ini operasional MGT dapat dipergunakan secara luas dan teknik MGT dapat diterapkan pada masalah yang ada dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia.

Hasil pemetaan terhadap kebutuhan guru di tanah air bila dihitung secara normal hingga tahun 2014 sebanyak 300 ribu guru lebih. Namun

demikian, kebutuhan guru yang jumlahnya cukup besar itu, bisa menjadi lebih efisien dan dikurangi, bila diatur dari sekarang dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan (Anonim, 2011: 1). Pemetaan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang ada pada saat ini. Jika diatur dengan komposisi 1 : 24, yakni satu guru mengajar 24 siswa, maka kelebihan tersebut bisa turun menjadi sekitar 180.000 guru. Dari jumlah itu bila diatur lagi dengan program *multigrade*, yakni seorang guru bisa mengajar lebih dari satu pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran sejenis, maka ke depan kelebihan jumlah guru bisa lebih diefisiensikan menjadi 40.000 guru.

Pembelajaran kelas rangkap atau *multigrade* dikhususkan untuk para peserta didik yang tinggal di daerah-daerah pedesaan dan terpencil dengan jumlah penduduknya yang jarang dan kurang beruntung (*disadvantaged*). Hal ini dimaksudkan untuk (1) mengurangi kesenjangan pendidikan antara anak-anak di daerah perkotaan dan pedesaan serta (2) memberikan layanan pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak usia sekolah dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Dasar.

Model pembelajaran kelas rangkap/*multigrade* diterapkan karena 1) sulitnya transportasi peserta didik karena bermukim jauh dari sekolah, 2) banyaknya sekolah yang mempunyai jumlah siswa terlalu kecil, 3) secara keseluruhan, terjadi kekurangan jumlah guru, sebagian disebabkan oleh penyebaran tidak merata, 4) kekurangan ruang kelas, 5) dan kemungkinan ada guru tidak hadir, padahal tidak ada guru cadangan.

Dalam pengelolaan sekolah *multigrade*, Guru harus dibekali dengan pengelolaan siswa heterogen dalam kelas yang sama. Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)/*Multigrade Teaching* juga dapat mengatasi masalah ketenagaaan di sekolah, karena saat ini sebagian besar daerah kekurangan guru. Jarang ditemukan sekolah dengan jumlah guru mencukupi, karena besarnya jumlah guru pensiun, sedangkan kuota pengangkatan guru baru dari pemerintah pusat jauh dari kebutuhan setiap tahun.

Pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap merupakan sebuah inovasi pembelajaran yang sangat berperan dalam rangka pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan. Penerapan model pembelajaran kelas rangkap (multigradasi) bagi sekolah-sekolah kecil karena kekurangan siswa yang jika di regrouping akan menimbulkan berbagai persoalan baik psikologis, sosial, maupun ekonomis perlu dikaji lebih lanjut dan dikembangkan.

Dalam pembelajaran terutama pembelajaran kelas rangkap, kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu sumber belajar sangatlah penting (Abidin, 2011: 7). Seorang guru dituntut mampu mengenali dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia disekitar siswa. Diantara sumber belajar yang dapat memanfaatkan adalah teman sesama guru disekolah sendiri atau sekolah lain, masyarakat di lingkungan sekolah, keluarga siswa beserta lingkungannya, lingkungan alam sekitar sekolah dan rumah siswa. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal terutama pada pembelajaran kelas rangkap

sebagai seorang guru anda perlu mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak.

Pada pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap atau *multigrade*, strategi pembelajaran merupakan suatu hal yang penting, karena dengan strategi yang tepat pembelajaran akan menarik dan menyenangkan. Kondisi ini memacu siswa untuk bisa belajar dengan baik dan termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar, yang pada akhirnya akan memberikan prestasi belajar yang baik.

Pada pembelajaran kelas rangkap guru melakukan penggabungan kelas-kelas antara kelas yang tinggi dan rendah antara peserta didik yang usianya tua dengan yang lebih muda. Pembelajaran ini menggunakan metode-metode berbasis keaktifan siswa, seperti diskusi, kerja kelompok, permainan, eksperimen dan tutor sebaya yang berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang lebih bersifat konvensional dimana semua berpusat pada guru. Hal ini sangat berperan dalam melakukan pembentukan kemandirian siswa. Para peserta didik dikondisikan sedemikian rupa agar mereka senantiasa aktif belajar dan khususnya belajar mandiri (*independent learning*), baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung pada guru.

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) atau *Multigrade Teaching* sejak tahun 2005 telah dilaksanakan di Kabupaten Pacitan melalui Surat Keputusan Bupati No. 100 Tahun 2005 tentang Penggabungan dan Perubahan Status Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan. Salah satu sekolah yang



menerapkan pengelolaan sekolah *multigrade* adalah SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan.

PKR telah dipakai di berbagai negara pada tahun 2005. Di Australia, 40% sekolah di Northern Territories menggunakan PKR pada tahun 1988. Di Inggris, 25% kelas di sekolah dasar merupakan kelas PKR. Di India pada tahun 1996, 94% sekolah dasar adalah sekolah PKR. PKR juga ditemukan di hampir semua sekolah di Nepal, 21% sekolah di Irlandia Utara, 78% sekolah di Peru, dan 63% sekolah di Srilanka.

Untuk mengelola PKR memang diperlukan guru yang inovatif yang berbekal pengetahuan dan keterampilan dalam model-model pembelajaran non-konvensional. Guru konvensional banyak menggunakan model-model pembelajaran berpusat pada guru, sehingga pembelajaran didominasi oleh penggunaan metode ceramah. Dalam mengelola kelas PKR, pembelajaran harus diubah menuju model berpusat pada siswa. Guru tidak dapat lagi menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Berbagai sumber belajar harus dimanfaatkan secara optimal dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran juga. Metode pembelajaran berbasis keaktifan siswa, seperti diskusi, kerja kelompok, resitasi, eksperimen, tutor sebaya, merupakan metode yang harus lebih banyak digunakan.

Khusus tentang pembelajaran kelas heterogen dengan model PKR, Little (2005) mencatat beberapa dampak dalam hal perluasan akses, prestasi

akademik, dan kepribadian/sosial siswa. Dalam hal akses, diperkirakan 15–25 juta anak usia sekolah di seluruh dunia tidak terakomodasi dengan pembelajaran monogradasi atau satu level. Dalam hal prestasi akademik, dilaporkan bahwa prestasi akademik anak PKR lebih baik daripada kelas satu level di negara-negara Togo, Colombia, Turki, Kepulauan Caicus, dan India. Hanya di Pakistan dilaporkan prestasi akademik mendukung kelas satu level. Dalam hal sosial/ personal, dilaporkan bahwa persahabatan, toleransi, konsep diri, dan sikap terhadap sekolah anak-anak di kelas PKR cenderung lebih baik atau sama dengan anak-anak di kelas satu level.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah “Bagaimana karakteristik pengelolaan sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan?”. Fokus penelitian terdiri dari tiga subfokus.

1. Bagaimana karakteristik aktivitas belajar peserta didik sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan?
2. Bagaimana aktivitas mengajar guru sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan?
3. Bagaimana karakteristik interaksi pembelajaran sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan?

### C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1. Mengkaji dan mendeskripsikan karakteristik aktivitas belajar peserta didik sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan.
2. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas mengajar guru sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan.
3. Mendeskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran sekolah *multigrade* di SD Negeri Pucangombo V Tegalombo Pacitan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan keilmuan tentang karakteristik aktivitas belajar peserta didik, karakteristik aktivitas mengajar guru, dan karakteristik interaksi sekolah *multigrade* serta dapat memperkaya khasanah kepustakaan berkaitan dengan pengelolaan sekolah *multigrade*. Penelitian ini juga digunakan, sebagai bahan masukan untuk penelitian terkait atau bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sebagai bahan masukan dan informasi sejauh mana pelaksanaan pengelolaan sekolah *multigrade* di Kabupaten Pacitan.

- b. Bagi kepala sekolah, sebagai masukan dalam pelaksanaan program agar dapat lebih meningkatkan mutu dan kualitas programnya secara profesional, khususnya terhadap hal-hal yang dipandang masih kurang dan perlu dilakukan pembenahan.
- c. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerjanya terutama terhadap hal-hal yang dipandang masih kurang sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
- d. Siswa sekolah dengan pengelolaan sekolah multigrade bisa mendapatkan kebutuhan yang lebih baik atau dengan kata lain terpenuhi hak atas pendidikan, dapat mengembangkan hubungan sosial lebih mandiri, lebih mampu beradaptasi dan berperilaku positif.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Pengelolaan merupakan proses kerjasama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan pada semua bentuk dan jenis organisasi.
2. *Multigrade* atau Pembelajaran Kelas Rangkap adalah suatu pendekatan pembelajaran dimana dalam proses belajar mengajar, para peserta didik dikondisikan sedemikian rupa agar mereka senantiasa aktif belajar dan khususnya belajar mandiri (*independent learning*), baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung pada guru.

3. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar.
4. Interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran.